

**Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis
(Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI))**

Fathorrahman¹

Mujahra

Fathor141985@gmail.com

Abstrak

FPI dikenal sebagai organisasi massa fundamentalis radikal. Atribut radikal, ekstrem, dan keras. Fakta inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya. Penelitian ini mengangkat masalah apakah ada korelasi antara radikal, ekstrim dan kekerasan yang dipraktikkan oleh FPI yang mereka yakini dan pahami, atau mereka seperti itu karena faktor lain. Kemudian, setelah analisis, ditemukan bahwa hal tersebut ada korelasi.

FPI menjadi organisasi massa fundamentalis radikal karena dipengaruhi oleh ideologi agama yang mereka pahami. Ideologi FPI cenderung ideologi yang tepat yang dikenal sebagai garis keras Islam. Artinya, meskipun FPI mengaku sebagai organisasi massa dengan ideologi propetik, tetapi Aswaja mereka tidak sama dengan Aswaja NU, pesantren, dan muhammadiyah. Penulis menemukan bahwa ideologi FPI adalah aswaja, mengikuti Imam Al-‘Asy’ari di bidang Aqidah dan Imam Syafi’i di bidang Fiqh.

Informasi di atas tidak sinkron dengan data lain yang juga dihasilkan dari analisis penulis. Data menyatakan bahwa ideologi FPI aswaja tidak sama dengan organisasi massa NU dan Muhammadiyah, dan ini diperkuat oleh pernyataan dan pengakuan para pemangku kepentingan FPI, bahwa FPI walaupun mengambil aswaja sebagai ideologinya tetapi tidak sama dengan aswaja dari massa pendahulunya.

Kata Kunci: Ideologi, Ormas, Radikal Fundamental

Abstract

FPI is known as radical fundamentalist mass organization. Radical, extreme, and violent attributes to it. This Fact that makes author interested to examine it. This research raises the issue of whether there is a correlation between radical, extreme and violent nature practiced by FPI which they believe and understand, or they are like that because of other factors. Then, after analysis, it was found that there was a correlation both of it.

FPI become radical fundamentalist mass organization because affected by religious ideology that they understand. FPI ideology tends to the right ideology that is known as hard line Islam. The meaning, eventhought FPI claims to be a mass organization with a propetic ideology, but their Aswaja are not the same as NU’s Aswaja, pesantren and muhammadiyah. Althought, the authors found that FPI’s ideology is aswaja, follow Imam Al-‘Asy’ari in the field of Aqidah and Imam Syafi’i in the field of Fiqh.

The information above is out of sync with other data that also generated from the author’s analysis. The data states that the ideology of FPI aswaja is not same as the mass organization of NU and Muhammadiyah, and this is strengthened by the statement and recognition of FPI stakeholder, that FPI althought taking aswaja as its ideology but not equal to aswaja from the mass of its predecessor.

Keywords: Ideology, Mass, Radical Fundamental

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman Gadu Barat Ganding Sumenep

Pendahuluan

Islam sebagai agama samawi memiliki pedoman dan ajaran yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunah. Al-Qur'an adalah firman Allah yang datang langsung darinya, sedangkan al-Sunah adalah dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan taqirir nabi. Pada dua kitab inilah umat Islam berpegang, dengan kata lain al-Qur'an dan al-Sunah dijadikan kiblat dalam beramal dan dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam proses mengambil sumber-sumber hukum dari kedua kitab ini mengalami keragaman interpretasi. Penafsiran di tingkat teologi disebut juga sebagai lapangan kajian tauhid yang menghasilkan beragam mazhab kalam berlevel dunia, karena diikuti oleh berbagai elemen masyarakat di dunia seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Asy'ariyah, dan sebagainya. Perbedaan penafsiran juga terjadi dalam bidang syari'ah, dimana dalam masalah ini telah memunculkan bermacam-macam mazhab fiqih, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali. Begitupun mengenai perintah-perintah yang secara tekstual bersumber sama dari al-Qur'an, namun dalam pelaksanaannya mengalami interpretasi yang berbeda. Misalnya mengenai perintah ber-*amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan secara berbeda antar kelompok keagamaan baik di seluruh belahan Negara Islam di dunia, lebih-lebih di Indonesia.² Pendekatan yang diambil dan yang digunakan dalam aksinya sesuai dengan hasil interpretasi mereka terhadap dua sumber hukum Islam itu tadi. Pada akhirnya, cara atau pendekatan yang digunakan itu melahirkan implikasi-implikasi yang berbeda pula.

Sebagaimana dikatakan Dale Eickelman dan James Piscatori, di dalam Alip Purnomo, bahwa salah satu ciri politik orang muslim saat ini adalah adanya perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol antar lembaga baik formal maupun informal.³ Interpretasi yang berbeda dan persaingan penafsiran simbol yang terjadi pada gilirannya memunculkan ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam, seperti FPI, ormas yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

² Alip Purnomo, *FPI Disalah Pahami*, cet. Ke-1, (Jakarta: Madiatama Indonesia, 2003), 1

³ *Ibid.*, 2.

Hal yang mungkin menjadi pertimbangan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama untuk melakukan perenungan kembali bahwa penggunaan simbol dan bahasa agama dalam sebuah gerakan sosial sangat rentan untuk dimanipulasi. Meskipun penggunaan simbol dan bahasa agama tersebut dalam sebuah gerakan sosial merupakan sesuatu yang mulia dan terpuji, namun tidak jarang tujuan itu berubah arah karena permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal semacam itu telah menjadi sejarah masa lampau ormas-ormas Islam pada dekade 1970 dan awal 1980-an, dimana kala itu ormas dituduh oleh pemerintahan Orde Baru melakukan gerakan yang berbau radikal-fundamentalis yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Terlepas apakah tuduhan itu benar atau tidak. Tetapi yang jelas gerakan radikal-fundamentalis memanglah berbahaya yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Asumsi itu dijadikan alasan pemerintah Orde Baru untuk mengambil sikap tegas terhadap gerakan Islam radikal-fundamentalis ini. Jalan tegas yang ditempuh pemerintah kala itu sangatlah rasional yakni demi menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan gerakan Islam radikal. Sekecil apa pun ia akan segera ditumpas oleh negara. Intinya, gerakan-gerakan kelompok Islam radikal kala itu tidak diberikan ruang bergerak secara bebas dalam merealisasikan misi-misinya. Bila dilihat secara cermat, sikap tegas pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mau mengambil resiko atas munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras (Islam radikal-fundamentalis). Sikap tegas pemerintah tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kasus sejarah di masa lalu, seperti peristiwa Tanjung Priok, Komando Jihad, Talang Sari Lampung, dan Haor Koneng Jawa Barat.⁴ Pada era ini, kelompok-kelompok Islam radikal benar-benar tidak bisa bergerak bebas karena secara intens mendapat tekanan dan tindakan yang keras dari pemerintah.

Ada satu hal yang menarik dari fakta di atas yang menurut penulis perlu diungkap, yaitu meskipun kelompok Islam garis keras ini mendapat tekanan dan tindakan keras dari pemerintah kala itu, kelompok ini tetap bertahan dan

⁴ Al-Zastrow Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 2.

keberadaannya tetap eksis dan atau tetap saja hidup. Mereka beraktivitas dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan, dan juga mereka melancarkan gerakan-gerakannya secara terselubung. Ini menjadi bukti bahwa betapa kuat dan solidnya kelompok ini meskipun secara terang-terangan sangat ditentang oleh negara dan sebagian masyarakat Indonesia. Rupanya keadaan itu tidak menciutkan nyali mereka untuk kemudian menjadikan mereka lemah, justru mereka merapatkan barisan agar tidak porak-poranda dihantam kekuatan pemerintah Orde Lama. Fakta sosial mereka (Islam radikal), menurut penulis menjadi signal bahwa kelompok ini akan tetap bertahan setelah lengsernya Orde Baru dan mau masuk ke Orde Reformasi.

Menurut Al-Zastrouw, memasuki era reformasi gerakan Islam seperti ini semakin leluasa bergerak, dan yang sebelumnya ruang mereka sempit sekarang menjadi terbuka. Ditambah lagi kontrol pemerintah semakin lemah membuat kelompok “Islam garis keras” semakin leluasa dalam menyuarakan aspirasinya dan mengekspresikan gerakannya. Selain itu, adanya ruang yang semakin terbuka kelompok ini semakin berani mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara satu-satunya.⁵ Masih sangat mungkin Pancasila itu dirubah dan diganti dengan asas yang selaras dengan Islam, dan Islam yang dimaksud adalah Islam menurut pemahaman mereka. Kelompok radikal-fundamentalis ini juga semakin gencar mengkampanyekan agar ajaran Islam dimasukkan ke berbagai lembaga dan simbol-simbol formal negara.

Fenomena di atas secara bersamaan berbanding lurus dengan lahirnya ormas-ormas baru yang sebelumnya belum dan tidak berani muncul, saat ini ormas baru ini muncul kepermukaan mengisi pesta reformasi di negeri ini. Pada masa sebelum reformasi (Orde Baru) kelompok anyar ini tidak berani muncul karena berkaca pada ormas pendahulu mereka yang diobok-obok oleh pemerintah, dan juga mendapat tekanan yang bertubi-tubi sehingga bibit-bibit ormas anyar ini menunda kemunculannya. Setelah era reformasi bergulir dan menghiasi Indonesia satu-persatu ormas-ormas ini muncul, seperti Brigade Hisbullah, Laskar Bulan Sabit, Laskar fi-Sabili, Laskar Santri, Laskar Putih, dan Front Pembela Islam,

⁵*Ibid.*

ormas yang peneliti jadikan obyek penelitian. Ormas-ormas baru ini dengan terang-terangan menggunakan nama dan simbol Islam untuk mengekspresikan kepentingannya. Adanya ormas-ormas tersebut di atas memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk bagaimana terealisasikannya syari'ah Islam di Indonesia, meski untuk itu beberapa di antaranya ada perbedaan dalam memberikan interpretasi terhadap syari'at dan bobot pelaksanaannya.⁶

Munculnya gerakan Islam radikal pada masa reformasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh lagi, karena menurut kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah negara yang menyukai kedamaian. Sedangkan jika dilihat dari kemunculan ormas radikal-fundamentalis ini jelas-jelas berbeda dengan akar sejarah Indonesia dan tidak sejalan dengan pemahaman maupun karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Jika dilihat dari akar sosio-antropologis, bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal gerakan keagamaan yang bersifat ideologis dan eksklusif, dan secara kultural masyarakat Indonesia suka toleransi dan cenderung akulturatif, tidak suka konflik, termasuk dalam beragama. Karena watak yang demikian itu, agama apa pun bisa masuk dan diterima secara damai oleh masyarakat Indonesia.⁷

Hal lain yang membuat menarik penelitian ini adalah bahwa para aktivis gerakan Islam radikal ini berasal dari berbagai elemen masyarakat. Dengan kata lain, menjadi wadah dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Secara stratifikasi, kelompok ini terdiri dari banyak profesi; ada pedagang, akademisi, dan sebagian birokrasi, ada juga para preman yang sengaja direkrut untuk penggerak gerakan yang siap berada di garda terdepan. Sedangkan secara diferensiasi, kelompok Islam garis keras ini terdiri dari para Habaib, ulama, kiai, dan santri.

Dekade 1990-an merupakan dekade istimewa, karena padanya lahir berbagai model gerakan Islam radikal-fundamentalis. Ormas-ormas ini bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan juga militer, sampai yang bercorak intelektual. Ormas yang bergerak dalam bidang sosial

⁶ *Ibid.*, 3.

⁷ *Ibid.*, 4.

diantaranya LDII dan KISDI, yang bergerak dalam bidang ekonomi adalah Darul Arqam, sementara yang berorientasi politik yaitu PBB, PKS, dan PSII, dalam bidang militer adalah Laskar Jihad, sedangkan yang bergerak dalam tataran intelektual adalah Lembaga Dakwah Kampus dan Nurul Fikr. Lembaga-lembaga di atas bergerak sesuai dengan orientasinya masing-masing, atau sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi mereka. Hal yang menarik dari fakta tersebut di atas adalah bahwa lembaga atau organisasi semuanya terintegrasi, ada, dan atau tergabung menjadi satu dalam wadah Front Pembela Islam (FPI). Itu berarti, FPI merupakan representasi dari semua lembaga tersebut.⁸

Hal selain di atas yang membuat menarik bagi peneliti untuk meneliti ormas Front Pembela Islam (FPI) ini adalah bahwa FPI mengklaim dirinya sebagai penganut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* atau yang disingkat aswaja ini. Namun demikian, aswaja yang seperti apa dan bagaimana aswaja yang mereka pahami. Hal ini urgen dilihat mengingat belum adanya hasil penelitian yang memang khusus membahas ideologi FPI secara komprehensif.

Pembahasan

A. Sejarah Singkat FPI

Biasa terjadi, bahwa berdirinya sebuah organisasi⁹ sudah barang tentu dilatari oleh suatu konteks sosial tertentu. Itulah secara umum, bahwa kebanyakan munculnya suatu organisasi tidak lepas dari lingkungan sosial yang telah atau sedang terjadi. Termasuk FPI, ormas keislaman yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, adalah juga merupakan bagian dari implikasi sosial yang terjadi kala itu.

Adapun konteks sosial yang melatari munculnya FPI adalah terjadinya perubahan sosial-politik secara besar-besaran di Indonesia. Pasca jatuhnya Rezim Orde Baru, wajah Indonesia berubah drastis dari yang menyeramkan,

⁸ *Ibid.*, 8.

⁹ Organisasi memiliki beberapa pengertian, yaitu antara lain: (1) A group of people, yaitu perkelompokan tertentu dari sejumlah orang-orang yang bekerja sama melaksanakan suatu usaha; (2) A system of authority, yaitu organisasi sebagai sistem wewenang yang memberikan kekuatan bagi setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya; (3) A system of function, yaitu sebagai sistem distribusi tugas, sehingga masing-masing pejabat memegang tugas tertentu. Lihat Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1968).

karena kediktatoran pemerintah kala itu, ke wajah yang mengembirakan. Jatuhnya Orde Baru merupakan kabar yang mengembirakan dan saat yang memang sangat dinanti-nantikan bagi semua golongan, kelompok, dan masyarakat Indonesia secara umum. Karena setelah Rezim Orde Baru jatuh kondisi sosial Indonesia berubah, yaitu semakin terbukanya ruang-ruang kebebasan berbuat dan berpendapat, yang sebelumnya tidak boleh dan dihalang oleh pemerintah Orde Baru. Perubahan sosial-politik yang dimaksud di sini adalah lahirnya masa reformasi. Lahirnya masa reformasi menjadi ajang bermunculannya partai politik baru, kelompok, atau ormas-ormas baru. Intinya hal-hal baru bermunculan di masa ini, baik yang positif atau bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, maupun yang negatif—yang hanya membawa dan menambah mudharat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum muslim Indonesia.

Menurut Nurkholish Madjid, yang dikutip Rosadi, terjadi ledakan partisipasi dalam era reformasi.¹⁰ Dan ledakan partisipasi itu merambah ke dalam berbagai bidang kehidupan; bidang politik, sosial, ekonomi, sampai agama. FPI yang menjadi kajian dalam penelitian ini termasuk salah satu bentuk partisipasi komunitas muslim tertentu yang mengusung bendera jihad menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia.

Jika dilacak dari sisi historis, minimal ada dua alasan atau latar belakang berdirinya FPI. *Pertama*, setelah Orde Baru tumbang dan beralih ke era reformasi, pada saat inilah FPI mendapatkan momentum terbaik untuk menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan gerakannya ke dunia nyata (dari atas panggung turun ke lapangan langsung). Dari yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, karena aktivitasnya takut diketahui oleh pemerintah,¹¹ saat ini

¹⁰ Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI: Mengungkap Rahasia-rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008). 25.

¹¹ Di era Soeharto, hampir tidak ada gerakan dari ormas-ormas Islam (terutama ormas yang mengusung anti pemerintah dan berhaluan keras atau yang lebih dikenal dengan Islam radikal-fundamentalis). Karena di era ini, pemerintah bersikap tegas terhadap gerakan semacam ini. Sekecil apa pun benih yang muncul maka segera mungkin pemerintah, dengan menggunakan kekuasaannya, akan menumpas gerakan itu. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak ingin mengambil resiko atas munculnya gerakan Islam garis keras yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan NKRI.

menjadi berani menunjukkan identitas mereka, bahkan mereka tidak malu disebut dirinya sebagai kelompok Islam garis keras (Islam radikal-fundamentalis). Jika dibandingkan dengan ormas-ormas lain, yang seumuran dengannya, FPI memiliki perbedaan mencolok, karena ormas yang satu ini berkonsentrasi menumpas kemaksiatan dan kemungkaran. FPI dengan tegas mengatakan bahwa mereka merupakan satu-satunya ormas yang berani dalam membumi hanguskan kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak salah kemudian jika FPI, oleh Al-Zastrouw disebut sebagai kelompok '*Islam aktif*'.

Kedua, kemunculan FPI sebagai sikap protes terhadap lambannya pemerintah dalam melakukan kontrol sosial, akibatnya banyak perilaku menyimpang terjadi, dari kasus kriminal, perampokan, serta premanisme. FPI menganggap bahwa Indonesia telah menjadi lumbung kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran seakan-akan menjadi hal yang diperbolehkan dan mendapat legitimasi dari pemerintah. Dalam rangka inilah keberadaan FPI dibutuhkan, yakni untuk menumpas dan membersihkan Indonesia dari kemaksiatan dan kemungkaran.

Secara resmi FPI berdiri pada hari Senin tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1419 H atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan Rabi'ul Tsani 1419 H., di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan.¹² Ada beberapa golongan elit agama yang terlibat dalam pendirian FPI, yaitu para habaib, ulama, dan beberapa kiai pesantren. Sedangkan sang pelopor berdirinya FPI adalah Habib Rezieq Shihab sendiri. Dengan kata lain, Habib Rezieq yang sebenarnya memiliki inisiatif mendirikan ormas FPI ini, dengan meminta pertimbangan dan masukan dari teman dekat beliau; beberapa habib, ulama, dan kiai pesantren, seperti tersebut di atas.

FPI memang masih muda jika dilihat dari tahun berdirinya, yaitu 17 Agustus 1998. Namun jika dilihat dari aktivitasnya, para aktivis organisasi ini jauh sebelum FPI berdiri telah memiliki kegiatan keagamaan, seperti misalnya tabligh akbar, audiensi, silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan

¹² Al-Zastrouw, *Gerakan Islam*, 89.

aparatus pemerintah, halaqah-halaqah, dan bahkan pernah melakukan aksi demonstrasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas (mungkin ini yang menjadi alasan berdirinya FPI), pada saat itu, banyak elemen masyarakat Indonesia yang menyerukan perubahan atau reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. FPI pun sama dengan mengusung tema reformasi di negeri ini, Indonesia, agar menjadi negara terhormat dan berwibawa, serta selamat dari kehancuran. Namun tema reformasi yang diusung FPI sedikit berbeda dengan tema-tema ormas lain atau masyarakat pada umumnya. Jika selain mereka mengusung tema reformasi politik, ekonomi, dan hukum, maka FPI berbeda, ia membawa tema dan misi reformasi moral.

Dengan demikian, FPI berdiri hanya memiliki orientasi perubahan moral. Kehadirannya untuk merubah moral masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari syariat Islam. Menurut mereka, Indonesia saat ini telah berada dititik bahaya dan mendekati kehancuran. Karena realitas yang nampak saat ini Indonesia menjadi lumbung kemaksiatan dan kemungkaran. Sementara itu, pemerintah dianggapnya telah gagal mengontrol kehidupan sosial dan menghentikan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi. Yang ada justru pemerintah terlibat di dalam lingkaran kemaksiatan dan kemungkaran itu. Lebih jauh lagi, pemerintah, menurut mereka, melegalisasi berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi yang sekarang semakin besar seperti bola es.

Fakta sosial FPI di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa berdirinya hanya untuk satu tujuan, yakni melakukan reformasi moral secara besar-besaran. Reformasi moral yang dimaksud adalah memperbaiki perilaku masyarakat Indonesia yang menyimpang dari garis agama Islam. Realisasi dari tujuan yang dimaksud adalah dengan cara ber-*amar ma'ruf nahi mungkar*. Definisi umum *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah perintah melakukan segala perkara yang baik menurut syara' (syari'ah Islam) dan mencegah segala yang mungkar atau yang bertentangan dengan Islam. FPI dalam melakukan *amar ma'ruf* menggunakan pendekatan dialogis dan musyawarah. Intinya adalah pada tataran ini mereka menggunakan cara yang

baik, sebuah cara yang telah diajarkan dalam Islam. Sedangkan dalam melakukan *nahi mungkar* FPI cenderung menggunakan cara-cara tegas dan tidak mau berkompromi, bahkan kadangkala FPI melakukan tindak kekerasan dan suka main hakim sendiri, dimana cara-cara tersebut sebenarnya dapat merugikan masyarakat dan bangsa.

B. Struktur dan Format Organisasi FPI

Berbicara struktur berarti sama halnya dengan membahas bangunan kepengurusan sebuah organisasi. Hal yang umum, bagi sebuah organisasi, mestinya memiliki bangunan kepengurusan secara vertikal, agar mudah dalam menjalankan fungsi organisasi tersebut. Jadi, tujuan dari didirikannya kepengurusan tiada lain untuk menjadikan aktivitas organisasi tersebut berjalan efektif, efisien, dan sistematis. Begitu juga dalam diri FPI. FPI sebagai ormas juga memiliki susunan atau struktur organisasi. Akan tetapi struktur dalam ormas ini tidak seperti struktur organisasi NU atau Muhammadiyah. Rupanya, FPI tidak terlalu peduli dengan struktur organisasi. Terbukti dalam organisasi FPI tidak adanya tertib administrasi dan dokumentasi. Jika dicermati lebih jauh lagi, organisasi FPI baik dari pusat, wilayah, sampai ke daerah, tidak ada koordinasi formal seperti layaknya organisasi formal yang ada. Sepintas terlihat, FPI merupakan ormas yang fokusnya tidak pada ranah formal atau kelembagaan, tetapi lebih fokus pada gerakan. Menggunakan bahasa penulis, FPI tidak lain hanyalah organisasi keislaman yang fokusnya lebih pada solidaritas emosional daripada mekanisme formal organisasi. Meskipun demikian, bukan berarti organisasi ini tidak memiliki struktur organisasi, tetapi mungkin bersifat formalitas.

Indikasi awal bahwa FPI tidak dan bukan seperti ormas lainnya (NU dan Muhammadiyah) yang memiliki kejelasan organisasi dan kerja adalah karena ormas yang satu ini (FPI) tidak memiliki manajemen kerja dan aturan main yang jelas. Sehingga seringkali gerakan mereka tidak terkontrol dan pada satu sisi merugikan masyarakat.¹³ Gerakan dan tata kerja FPI lebih ditentukan oleh kebijakan para elit organisasi. Dalam hubungan antarorgannya pun hanya

¹³ *Ibid.*, 92.

didasarkan pada konsensus bersama. Dengan kata lain, organisasi ini sebenarnya bukan organisasi masa, melainkan lebih merupakan komunitas yang melakukan gerakan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴

Karena FPI tidak mengutamakan kelembagaan, maka organisasi ini lebih mengkhususkan diri pada gerakan. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan untuk menumpas kemaksiatan. Hal ini sejalan dengan pengambilan namanya, yaitu Front Pembela Islam. Kata *Front* mengandung arti bahwa organisasi ini berusaha untuk selalu ada digaris terdepan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kata *pembela* mengandung makna bahwa organisasi ini akan berusaha berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak umat Islam. Sedangkan kata terakhir, yaitu *Islam* mengindikasikan bahwa organisasi ini dalam derap langkahnya sesuai dengan Islam yang lurus dan benar.¹⁵

Dalam gerakannya, FPI lebih mengutamakan aksi. Artinya, gerakan FPI hampir bisa dikatakan tidak terkordinir dengan baik dan rapi. Karena yang menjadi target bukan sistematisasi gerakan akan tetapi hasil gerakan itu sendiri, yakni berupa menumpas kemungkaran dan kemaksiatan. Dan boleh dikata, tentang gerakan dalam organisasi FPI lebih bersifat temporal dan kondisional sesuai dengan kebutuhan gerakan. Sementara itu, dalam berbagai gerakan yang mereka lakukan, kelompok elit—yang terdiri dari para habaib dan ulama, seringkali menempati posisi teratas dan menjadi penentu arah kebijakan aksi. Artinya, FPI dalam aksi gerakannya menunggu instruksi habaib dan ulama, utamanya dari Habib Rizieq Shihab sendiri.

Habib Rizieq Shihab sebagai ketua umum FPI memiliki peran sentral dalam menentukan segala sesuatunya di dalam organisasi FPI ini, dari visi-misi, format atau bentuk gerakan, sampai arah gerakannya, maka Habib Rizieq-lah yang menentukan, tentunya juga dengan meminta saran dan masukan dari habaib, ulama, dan kiai lain. Tidak hanya itu, Rizieq sebagai ketua umum dan para elit yang lain memberikan doktrin kepada para

¹⁴ *Ibid.*, 93.

¹⁵ *Ibid.*

pengikutnya bahwa mereka adalah orang-orang suci, dimana dalam posisi ini mereka memiliki legitimasi agama, yang tidak boleh ditentang perintahnya, tidak boleh ditolak segala dawuhnya. Taat patuh para pengikut organisasi FPI ini adalah harga mati.

Dengan melihat fakta di atas, jelaslah bahwa FPI bukan organisasi massa konvensional, yang memiliki konstitusi, pembagian otoritas, mekanisme kerja, dan aturan main organisasi yang jelas. Organisasi semacam itu tidak menarik bagi mereka, karena bertentangan dengan pemahaman mereka. Bagi mereka, organisasi semacam itu tak ubahnya seperti organisasi sekuler dan berbau kapitalisme. Rupanya tampilan organisasi FPI adalah wujud dari cerminan pemahaman keagamaan para aktivis FPI.

Tampilan organisasi FPI yang sederhana ini dapat dipahami secara mudah. Karena menurut penulis, adanya struktur organisasi di dalam tubuh FPI itu sebenarnya hanya untuk memudahkan koordinasi dan pembagian tugas ketika melakukan gerakan. Adapun susunan struktur organisasi FPI adalah terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi berada di pusat bernama Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di Jakarta. Di tingkat Propinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah, dan ditingkat Kabupaten disebut Dewan Pengurus Cabang. Meskipun memiliki tingkatan kepengurusan secara hierarkis, namun hubungan pada tiap-tiap tingkatan tidak terjadi secara struktural. Fungsi dari pengurus tertinggi adalah sebagai pemantau, yang memantau jalannya organisasi dan berbagai aktivitas FPI.¹⁶

Ada fakta yang menarik untuk ditampilkan dari FPI, bahwa terdapat cabang FPI yang benar-benar berbeda dari cabang lainnya, yaitu cabang di Solo dan Yogyakarta. FPI di kota ini benar-benar independen dan tidak memiliki jalur koordinasi dengan FPI yang berada di pusat. Karena itu, FPI di dua kota ini memiliki otonomi penuh dalam merealisasikan visi-misinya, dan juga dalam berbagai aktivitas atau gerakannya. Menurut pengurus FPI, sebagaimana dikutip Al-Zastrow, hubungan antara mereka dengan pusat hanya terbatas pada kesamaan ideologi, yaitu Islam *Ahl al-Sunnah wa al-*

¹⁶ *Ibid.*, 94.

Jamaah, juga kesamaan visi-misi membela Islam dan umat Islam Indonesia, anti terhadap sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (SIPILIS), serta kesamaan garis perjuangan dan gerakannya.¹⁷

C. Keanggotaan dan Jaringan FPI

Sebagaimana keterangan diawal, FPI tidak seperti organisasi NU dan Muhammadiyah. Ketidaksamaan ini dikarenakan FPI dengan tegas menyatakan diri bahwa mereka bukanlah organisasi yang mementingkan kelembagaan dan manajemen organisasi, melainkan fokus mereka pada gerakan massa. FPI juga bukan sebagai organisasi kader. Jika demikian, secara organisasi FPI memiliki masalah penting, yaitu kaderisasi. Seringkali mereka kekurangan personel untuk menjalankan organisasi. Tidak adanya kaderisasi secara formal juga dapat menyebabkan organisasi ini sulit untuk berkembang. Bahkan, ketika kita melihat aksi-aksinya di lapangan anggota FPI cenderung menurun. Padahal sebagaimana kita ketahui, keberlangsungan sebuah organisasi amat dipengaruhi oleh faktor kaderisasi. Besar kecilnya sebuah organisasi dapat diukur dari kaderisasi yang mereka lakukan.

Jika dilacak proses rekrutmen anggota FPI dari awal berdirinya sampai saat ini, ada beberapa fakta menarik yang dapat kita tampilkan, yaitu, pertama, pada awalnya FPI ibarat sebuah masjid. Siapa pun (tidak melihat perbedaan, asalkan seagama) dapat masuk ke dalamnya. Jika seseorang telah masuk ke dalamnya maka secara otomatis orang itu secara sah menjadi anggota FPI. Begitu juga kalau ingin keluar dari FPI, tanpa persyaratan apa-apa dapat langsung keluar, seperti layaknya seseorang yang keluar dari masjid. Dan jika telah keluar, maka ia secara otomatis pula keanggotaannya sebagai anggota FPI akan hilang. *Kedua*, seiring berjalan dan berkembangnya waktu dan keadaan, dan atau tuntutan organisasi, sekarang FPI lebih selektif dalam memilih anggota, yaitu dengan menggunakan cara-cara seleksi layaknya organisasi modern, misalnya menggunakan metode *interview*,

¹⁷ *Ibid.*

dengan persyaratan mampu membaca Al-Qur'an, telah berumur minimal 15 tahun, dan telah mendapat restu orang tua.¹⁸

Hampir senada dengan pernyataan di atas, menurut Al-Zastrouw proses rekrutmen anggota di dalam FPI berjalan secara insidental sesuai dengan kebutuhan: terkadang setahun sekali, setahun duakali, bahkan bisa tidak dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun. Pada saat tertentu, FPI mengedarkan formulir pendaftaran untuk merekrut anggota baru. Formulir ini biasanya diedarkan di kampus-kampus, majlis taklim, dan juga di kalangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen ini biasanya diadakan tes seleksi yang tidak ketat, karena tes ini sebenarnya tidak menentukan lulus tidaknya, namun hanya untuk mengukur dan mengetahui tingkat pemahaman calon anggota tentang pengetahuan keagamaannya. Materi tesnya meliputi tes baca Al-Qur'an, pengetahuan mengenai rukun iman, rukun Islam, dan syahadat.¹⁹

Pola rekrutmen tersebut di atas tidak terlalu efektif, dikarenakan tidak banyak elemen masyarakat yang mengikuti jalur seperti itu. Masyarakat pada umumnya mengikuti jalur tanpa tes, yaitu langsung mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, misalnya pengajian dan majlis-majlis taklim lainnya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut maka secara otomatis akan terdaftar menjadi anggota resmi FPI. Cara semacam ini hanya mensyaratkan calon anggota mendapat rekomendasi dari teman dekatnya yang lebih dulu menjadi anggota FPI atau teman yang telah menjadi pengurus, hal itu semakin memudahkan calon anggota menjadi anggota organisasi ini. Dengan demikian, ukuran menjadi anggota aktif organisasi FPI dapat dilihat dari keaktifannya mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh FPI, misalnya pengajian-pengajian, halaqah, majlis taklim, sampai gerakan demonstrasi ke lapangan. Dan jika anggota tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di atas, ia akan dinyatakan berkhianat dan keluar dari organisasi. Adapun yang menentukan apakah seseorang telah berkhianat atau tidak adalah ketua umum atau wakil Majelis Syuro.

¹⁸ Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, 102.

¹⁹ Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam*, 102.

Secara sosiologis, ada empat kategori anggota dalam FPI. *Pertama*, masyarakat awam, yaitu masyarakat biasa yang aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh FPI. Masyarakat yang mengikuti pengajian akan dianggap (tidak jarang sampai diklaim oleh pihak FPI) sebagai anggota resmi organisasi. Klaim semacam itu menimbulkan dua hal, yaitu bisa saja beberapa orang langsung menyatakan dirinya sebagai anggota, dan juga sering terjadi beberapa orang tidak berminat menjadi anggota FPI, melainkan mereka hanya ingin mengikuti pengajian yang diselenggarakan FPI.

Kedua, kelompok intelektual dan akademisi, yaitu para dosen, peneliti, dan mahasiswa. Kelompok ini secara spesifik berasal dari kampus atau fakultas umum atau eksak, yang dangkal pemahamannya. Ada juga yang berasal dari kampus atau fakultas agama, namun tidaklah banyak, misalnya dari STAIN, IAIN, atau UIN, dan atau yang berasal dari kampus agama swasta yang berada di bawah yayasan. Sedikit sekali di antara mereka yang lulusan pesantren. Hal demikian menjadi wajar, karena biasanya orang pesantren tidak sepaham dengan FPI, sehingga membuat mereka tidak berminat mengikuti jejak FPI, apalagi terlibat aktif di dalamnya.

Ketiga, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan kelompok pertama. Karena salah satu alasan para elit FPI merekrut preman dan anak jalanan adalah untuk dijadikan kelompok garda terdepan yang siap mengawal aksi di lapangan. Dari awal perekrutannya sudah berbeda, yaitu kelompok ini tanpa jalur pendaftaran resmi. Mereka direkrut melalui jalur pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin FPI. Kelompok ini tidak banyak diberikan pengetahuan agama, tetapi lebih banyak diberikan latihan fisik, seperti kader banser di NU.

Keempat, golongan habaib, ulama, dan kiai. Golongan inilah yang paling tinggi posisinya di FPI. Golongan ini juga yang paling banyak mendominasi posisi-posisi penting di kepengurusan FPI. Posisi mereka teratas karena kapasitas dan kualitas diri mereka yang lebih dari yang lainnya. Karena golongan ini dianggap memiliki pengetahuan agama yang mumpuni dan lebih

dekat dengan Allah SWT, sehingga pantas bagi mereka mendapatkan posisi elit dan menjadi pemimpin, dan atau menjadi panutan para anggota FPI. Lebih-lebih golongan habaib, yang diklaim sebagai keturunan anak cucu dari nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka katakan dan mereka lakukan pasti diikuti oleh para jamaah dan anggota FPI. Intinya adalah golongan inilah yang memiliki otoritas penuh atas organisasi ini. Kemana arah berjalan dan gerakan FPI maka merekalah yang menentukannya. Mereka juga menjadi pemangku kebijakan, artinya segala kebijakan yang ada dikeluarkan oleh golongan ini.²⁰

D. Program Kerja FPI

Struktur kepengurusan FPI, seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak terlalu memikirkan hal-hal formal, seperti anjuran manajemen organisasi. Namun meskipun demikian, FPI sebagai ormas keagamaan tetap memiliki program kerja, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ART. Dan ini terbagi ke dalam beberapa bidang, seperti bidang ibadah, dakwah, fatwa, departemen luar negeri, sopol hukum dan HAM, kebudayaan, dan jihad — terdapat keinginan yang kuat dalam organisasi ini untuk menjalankan dan menegakkan sya'riat Islam secara *kaffah* dan *istiqomah*.²¹

FPI di bidang ibadah merasa penting untuk turun langsung memperbaiki ibadah-ibadah yang kurang benar dan menyimpang dari ajaran sya'riat Islam. Dalam hal ini bimbingan langsung, menurut FPI merupakan cara efektif dalam memberikan pemahaman ibadah yang benar dan lurus terhadap elemen masyarakat utamanya bagi anggota-anggota FPI. Bidang dakwah dilakukannya dengan cara mengadakan halaqah-halaqah, majlis ta'lim, atau pengajian umum di berbagai tempat. Bidang fatwa juga dirasa perlu, karena melalui bidang inilah FPI dapat menyampaikan fatwa-fatwa yang mereka yakini, untuk kemudian ditransformasikan kedalam masyarakat.

Sementara itu, departemen luar negeri memiliki tugas yang agak berat, karena bidang ini berkewajiban untuk mengadakan hubungan internasional,

²⁰ *Ibid.*, 108.

²¹ Alip Purnomo, *FPI disalahpahami*, 38.

khususnya dengan negara-negara Islam. Negara-negara Islam yang tertindas wajib dibantu, melalui bidang departemen ini, baik bantuan itu berbentuk materi, non-materi, fisik, sampai bantuan mengirim pasukan FPI jika diperlukan. Intinya, bidang ini harus dapat memastikan tidak ada lagi negara-negara Islam yang tertindas oleh penindas. FPI merasa berkewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat negara Islam, karena bagi FPI mereka adalah teman-teman seiman dan seagama yang harus dibela. Di sisi lain, bidang departemen luar negeri juga bertoleransi dengan negara non Islam, juga dengan masyarakat non-Islam yang berada di Indonesia, sepanjang mereka bukanlah kafir *harbi*.²²

Sedangkan dalam bidang sospol hukum dan HAM, bertekad membela para *Mustadh'afin* (orang-orang lemah di bidang ekonomi), juga memperjuangkan HAM (sesuai dengan yang mereka pahami). Tak kalah pentingnya juga, melakukan kontrol terhadap pemerintah atau politisi. FPI mengupayakan dan mendorong pemerintah agar kebijakan-kebijakannya pro terhadap rakyat dan umat Islam, demi kemaslahatan umat. Bidang kebudayaan, FPI melakukan kontrol dan perbaikan terhadap berbagai kebudayaan yang berkembang di masyarakat, dimana oleh FPI kebudayaan tersebut dipandang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sedangkan yang terakhir, bidang jihad merupakan ladang utama bagi FPI, karena bidang ini merupakan ladang perjuangannya. Misi FPI menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.²³

E. Menakar Akar Ideologi Front Pembela Islam

Ending dari bahasan ini akan menemukan identitas daripada ideologi FPI (sebagai ormas radikal-fundamentalis). Jika sudah diketahui maka kita secara otomatis akan mengetahui bentuk gerakan-gerakan mereka. Mengapa gerakan FPI seperti itu, misalnya anarkis. Biasanya sikap seseorang, kelompok, atau organisasi tertentu akan dipengaruhi oleh ideologi atau apa yang mereka

²² *Ibid.*, 39.

²³ *Ibid.*, 40.

pahami. Keyakinan seperti itu akan selalu dipegang teguh olehnya dan menjadi dasar dari setiap gerak dan aktivitasnya. Termasuk FPI ini, segala aktivitas dan gerakan mereka sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ideologi mereka sendiri.

Ketika penulis lacak dari buku pedoman dasar FPI, ditemukan bahwa ideologi FPI adalah *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*,²⁴ dengan bermazhab pada aqidah asy'ari dan di bidang fiqh mereka bermazhab pada al-Syafi'i.²⁵ Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang mazhab apa yang menjadi pedoman mereka dalam bidang tasawuf. Apakah mereka meyakini tasawuf atau tidak (seperti kelompok salafi Wahabi yang tidak meyakini tasawuf sebagai jalan untuk mengenal dan mendekat kepada Allah SWT, bahkan menurut aliran ini ajaran tasawuf mereka anggap bid'ah).²⁶ Terkait masalah ini, apakah FPI meyakini keberadaan tasawuf (sebagai bagian dari ajaran Islam) tidak diterangkan dalam buku 'Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI'.

Hampir sama dengan apa yang berada dalam buku 'Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI', bahwa FPI berhaluan atau bermazhab pada *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Hal ini sesuai dengan pengakuan para *stake holder* FPI bahwa FPI mengambil aswaja sebagai ideologinya. Namun menurut mereka, aswaja yang mereka pahami tidaklah sama dengan aswaja yang dipahami oleh ormas-ormas pendahulu mereka, seperti NU dan Muhammadiyah. Aswaja yang dipahami para aktivis FPI lebih mendekati pada aswaja kelompok Salafi yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Talib yang berdomisili di Yogyakarta. Menurut kelompok ini, aswaja yang lurus

²⁴ Secara etimologis istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* terdiri dari tiga kata, yaitu *Ahl* yang berarti keluarga, pengikut, dan golongan. Kata *al-Sunnah* memiliki makna thariqah (jalan dan perilaku) baik jalan tersebut benar atau pun salah. Menurut al-Syatibi, kata *al-Sunnah* merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan para sahabat nabi, baik yang ditemukan dalam al-Qur'an maupun sunnah nabi. Sedangkan kata yang ketiga adalah *wa al-Jama'ah* memiliki pengertian orang-orang yang menjaga kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai tujuan, atau dapat juga dikatakan sebagai komunitas muslim mayoritas. Lihat Tim Penulis Batartama, *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah, dan tasawuf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2012), 15-16.

²⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI (Jakarta Pusat), 4.

²⁶ Bid'ah karena tidak dilakukan atau dicontohkan Nabi SAW.

adalah mengakui kebenaran (kebenaran yang pasti) yang berasal dari al-Qur'an dan hadist. Kebenaran yang pasti itu berasal dari Nabi SAW., para sahabat, dan tabi'in yang belajar padanya.

FPI tidak sependapat jika dikatakan aswaja berasal dari Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi. Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi tidak diakui oleh mereka sebagai pelopor atau penggagas rumusan aswaja, seperti apa yang diyakini oleh NU dan kaum pesantren kebanyakan, yang mengikuti mazhab Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang aqidah, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal dalam bidang fiqh, sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan al-Junaid al-Baghdadi, dan yang terakhir mengikuti Bukhori dan Muslim dalam bidang hadist.

Dengan demikian, penulis menemukan kejanggalan terhadap rumusan aswaja yang berada di buku 'Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI' dengan yang dibuku 'Gerakan Islam Simbolik; Politik Kepentingan FPI' karangan al-Zastrouw Ng. Dibuku pertama dijelaskan bahwa FPI bermazhab aswaja ala al-Asy'ari, sedangkan dibuku yang kedua tidak demikian, sama mengaku berideologi aswaja tetapi aswaja dalam bentuk lain, yakni aswaja yang condong kepada aswajanya Ustadz Jakfar Umar Talib Yogyakarta.

Dari perbedaan tersebut, penulis dapat menemukan benang merah perbedaan aswaja antara FPI dengan NU, jika disumberkan pada buku yang pertama dan yang kedua, yaitu bahwa aswaja FPI ingin menjaga otentisitas agama Islam, sampai pada hal-hal yang bersifat simbolik. Maka dari itu, perbedaan ritus dan simbol menjadi masalah bagi FPI. Menurutnya, perbedaan simbol dan ritus adalah termasuk sebuah penyimpangan dan kesalahan. Agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan dalam ibadah harus mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat terjaga kemurnian ibadahnya, bahkan mereka banyak mendapat pujian dari Allah SWT dan Nabi SAW sendiri.²⁷

²⁷ Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik*, 98.

Menurut al-Zastrouw, ada beberapa alasan mengapa FPI termasuk Salafi selalu merujuk pada para sahabat. *Pertama*, para sahabat Nabi SAW. adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, begitu juga mereka (para sahabat) mencintai Allah SWT. Sebagaimana keterangan Nabi SAW. sendiri bahwa para sahabat itu adalah generasi terbaik bila diukur dengan generasi setelahnya. *Kedua*, sahabat-sahabat Nabi SAW. adalah umat yang adil, yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Dengan keadilan yang mereka miliki, mereka diproyeksikan dapat memberikan bimbingan kepada segenap manusia setelah Rasul SAW meninggal. *Ketiga*, para sahabat Nabi adalah tauladan paling baik setelah Nabi, sehingga mereka layak menjadi sumber keteladanan setelah Nabi bagi manusia beriman. *Keempat*, kebaikan para sahabat tidak mungkin disamai oleh generasi yang lain. *Kelima*, para sahabat adalah sebaik-baik generasi penerus, hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW. *Keenam*, para sahabat Nabi SAW. memang sengaja diciptakan oleh Allah SWT untuk mendampingi Rasulullah SAW.²⁸

Jika dilihat dari keterangan tersebut, terbersit sebuah pemahaman bahwa mereka salafi, yang di dalamnya FPI berada dalam mengikuti jejak para *salafus shaleh* tidak boleh setengah-setengah, harus dilakukan secara total, tanpa *reserve*. Apa yang mereka fatwakan (katakan), lakukan, serta cara mereka beribadah diikuti secara utuh dan apa adanya, tidak boleh mengurangi dan menambahi. Karena pengurangan dan penambahan ditakutkan justru terjerumus ke dalam kegelapan atau kesalahan. Dengan demikian, FPI ingin mengatakan bahwa dalam hal ibadah, cara berpakaian, cara makan dan minum, dan hal-hal sunnah lainnya mengikuti sahabat Nabi SAW. Intinya, FPI mengajak masyarakat mengikuti jejak-jejak para sahabat dalam hal aqidah, syari'ah, dan tingkah laku keseharian mereka. Oleh karena itu, pemahaman FPI lebih berorientasikan pada simbol-simbol, mereka senang dengan hal-hal yang berbahu simbol. Sekilas dapat dipahami, bahwa hal-hal inilah yang membedakan FPI dengan NU.

²⁸*Ibid.*, 99.

Jika demikian, FPI berbeda faham dengan NU dan komunitas pesantren. Aswaja yang dipahami FPI sedikit berbeda dengan aswaja yang dipahami NU dan pesantren. Di sini, FPI tidak mengakui Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi sebagai dua imam yang menggagas faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Mereka lebih memiliki keyakinan bahwa aswaja berasal dari Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para sahabatnya. FPI juga tidak mengakui pendekatan-pendekatan atau metodologi ijtihad dalam melahirkan hukum. Karena mereka berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadist. Meskipun faktanya, FPI di sisi yang lain mengakui Imam Syafi'i sebagai imam fiqh, dan menjadikannya sebagai mazhab mereka (sebagaimana termaktub dalam buku dasar mereka).²⁹ Jelas, di sini terjadi kerancuan pemahaman keagamaan, karena perbedaan di atas. Apakah munculnya perbedaan itu karena pengaruh belum jelasnya struktur formal mereka, atau di dalam tubuh FPI terjadi kerancuan pemahaman dalam memahami atau menginterpretasikan Islam dan sumber-sumber hukumnya. Terlepas mana yang benar dan mana yang salah, perlu ada penelitian lanjutan yang meneliti masalah tersebut, sehingga terungkap jelas menjadi fakta ilmiah yang dapat membantu kita memberikan informasi perkembangan ideologi FPI. Tetapi yang jelas, kerancuan ideologi atau pemahaman keagamaan yang terjadi dalam tubuh FPI tersebut (karena adanya keterangan yang berbeda antara buku yang pertama dan yang kedua) menandakan bahwa di dalam tubuh FPI telah terjadi kesalahan penggunaan metodologi atau pendekatan yang dipakai mereka, sehingga melahirkan sebuah pemahaman yang mendua. Dan prediksi penulis sementara, hal itu terjadi karena antara elit FPI terjadi miskomunikasi dan sistem FPI yang kurang berjalan dan tidak tertata rapi.

Selain itu, FPI tidak memiliki sikap seperti yang dimiliki NU dan pesantren pada umumnya, seperti *tawassuth*, *ta'adul*, *tawazun*, dan *tasamuh*. Akibatnya, sangat wajar jika pada setiap gerakan FPI terlihat anarkis dan main hakim sendiri. Dengan *tawassuth* dan *ta'adul* seharusnya FPI lebih bersikap moderat dalam menghadapi segala persoalan

²⁹ Anggaran Dasar FPI, 4.

kemasyarakatan. Berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan masyarakat dilihat dari kaca mata *tawassuth*, *ta'adul*, *tawazun*, dan *tasamuh*, sehingga kemaksiatan dan kemungkaran di atas dicarikan solusi terbaik tanpa ada penindasan, apalagi melanggar hak asasi manusia.³⁰

Tawassuth dalam menyikapi budaya akan melahirkan sikap akomodatif terhadap budaya yang dinamis. Tidak lantas menyalahkannya apalagi memfonis budaya-tradisi suatu komunitas (seagama dan seiman) tahayul dan bid'ah. Sekali lagi, hal-hal di atas yang tidak dimiliki oleh FPI, sehingga sangat wajar jika mereka bersikap apatis dan anarkis. Ditambah lagi, interpretasi mereka terhadap al-Qur'an dan hadist yang tidak menyeluruh. Karena ayat-ayat yang mereka tafsirkan hanya ayat-ayat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar dan tentang jihad.

Jika didasarkan pada fakta dan realita FPI sebagaimana uraian di atas, maka jelas FPI termasuk salah satu ormas radikal-fundamentalis. Hal tersebut ditunjukkan dengan ideologi yang mereka pahami dan yang mereka pilih—yang dihasilkan melalui proses interpretasi mereka sendiri atas Islam beserta sumber hukumnya (al-Qur'an dan al-Hadist). Implikasi dari ideologi yang mereka yakini dan pahami adalah gerakan mereka pasti radikal-fundamentalis, anarkistis, main hakim sendiri, serta sikapnya yang cenderung kasar tanpa mengenal toleransi terhadap pihak lain yang tidak sejalan dengan mereka. Dengan demikian, menurut penulis, FPI termasuk ormas keagamaan yang bersayap kanan. Pernyataan ini didukung oleh Afif Hasan dalam bukunya yang berjudul 'Ideologi Transnasional (Sebuah Pengantar Mewaspada Aswaja Oplosan)' bahwa setiap ormas yang kasar, ekstrim, radikal, dan fundamentalis pasti tergolong sebagai ormas sayap kanan atau ideologi kanan. Selain itu, biasanya ormas tersebut juga memiliki misi yang dibungkus dalam setiap aksi dan gerakannya, yaitu misi Daulah Islamiyah,³¹ sebuah cita-cita untuk mendirikan negara Islam, dengan mengganti sistem negara yang telah ada. Dengan begitu, keberadaan FPI pada beberapa sisi

³⁰ Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja*, 4.

³¹ M. Afif Hasan, *Ideologi Transnasional: Sebuah Pengantar Mewaspada Aswaja Oplosan*, (Mojokerto: Insan Global), 30.

membahayakan bagi keutuhan NKRI, karena sifat gerakannya yang radikal-fundamentalis dan misionaris mereka untuk mendirikan negara Islam (*Dawlah Islamiyah*).

Statement FPI membahayakan bagi keutuhan Indonesia, karena penulis tetap memiliki keyakinan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu sampai saat ini mencintai perdamaian, sangat menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai bagian darinya, dan wataknya yang akomodatif dan akulturatif. Sebaliknya, masyarakat Indonesia tidak menyukai kekerasan dan pemaksaan dalam hal apa pun yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sehingga, siapa pun itu, apa pun organisasinya, atau bahkan agama apa pun itu, tetapi keras, radikal, dan ekstrim, tidak akan diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan akan dibuang jauh-jauh dari kehidupan mereka.

Jika kita melihat sejarah masuknya Islam ke Indonesia, bahwa Islam masuk dengan cara damai, dialogis, dan akulturatif terhadap budaya lokal.³²Wajah Islam yang demikian memiliki kesamaan dengan watak masyarakat Indonesia yang cinta damai, harmoni, dan mengedepankan cara-cara dialogis. Itu mengapa Islam bisa dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, meskipun tergolong agama yang baru. Jadi, Islam damai dan watak masyarakat yang cinta damai inilah yang dijadikan modal oleh masyarakat Indonesia sendiri untuk membangun Indonesia yang damai dan bermartabat. Kosekwensi logisnya, kelompok yang tidak sesuai dan tidak menyesuaikan diri dengan dua hal di atas akan mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat muslim Indonesia. Tidak hanya itu, mereka akan menjadi musuh daripada masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk (dalam konteks ini FPI). Jadi dapat disimpulkan, bahwa ideologi kanan (radikal, fundamentalis, dan

³² Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam (Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara)*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Bekerja sama dengan Nadi Pustaka Yogyakarta, 2012), 33. Tentang alasan mengapa Islam kala itu dibawa dengan cara damai karena yang dibawa oleh ulama-ulama Timur Tengah maupun India adalah Islam Sunni (Islam Tasawuf). Sedangkan Islam Sunni tersebut adalah Islam yang menggabungkan tiga pemahaman dasar atau ajaran Islam itu sendiri, yang lebih akrab dengan sebutan sistem credo, sistem ritus, dan sistem norma. Lihat Sunardji Dahri Tiam, *Muqaddimah Berislam Kaffah (Secara Berurutan, dan Menyeluruh Sesuai al-Qur'an dan al-Sunah)*, (Malang: Intimedia, 2015).

ekstrims) yang di dalamnya FPI berada, tidak cocok berada di Indonesia, tidak mendapat tempat untuk berkembang di sini, di bumi seperti Indonesia, karena bertentangan dengan watak Islam dan masyarakat Indonesia yang sejatinya sangat cinta dengan kedamaian.

Penulis meminjam bahasanya salah seorang pemikir muslim, Abou El Fadl, bahwa Islam hadir ke dunia—yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa misi kedamaian. Agama Islam yang rahmatan lil alamin membawa misi suci mengangkat harkat dan martabat manusia, karena bagi Islam manusia adalah makhluk yang beradab dan beretika. Karena alasan itu ia harus dimulyakan. Abou El Fadl ingin menggiring pemikiran kita bahwa Islam sangat menghormati manusia sebagai makhluk Allah yang sangat mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari sini sangat wajar, bahkan sangat rasional jika Islam menawarkan solusi hidup bertoleransi, tidak ada paksaan, baik dalam beragama, maupun dalam berbagai dimensi kehidupan.³³

Pendapat Abou El Fadl jika ditarik ke dalam konteks keagamaan Indonesiasangat selaras dengan apa yang ada di Indonesia, sangat sesuai dengan watak masyarakat Indonesia yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sangat menghormati perbedaan antara manusia yang satu dengan lainnya (seperti apa yang telah diuraikan di atas oleh penulis). Jadi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan majemuk ini menginginkan agama yang cocok dengan watak, tradisi, dan kebudayaan mereka, dan jawabannya ada pada Islam, yang dibawa oleh Wali Songo dengan cara damai, yang berarti juga Islam itu sendiri adalah agama damai.³⁴

Penutup

Berdasarkan hasil riset di atas, dapat dinyatakan bahwa ideologi FPI adalah aswaja. Namun, ideologi FPI ini terjadi dualisme konsep yang masing-

³³ Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fiqh dan Akhlak*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012).

³⁴ Muh. Tasrif, *Konsep Pluralisme Dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Nurcholis Madjid atas Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Pluralisme*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 31-32.

masing antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan itu akan diuraikan secara singkat di bawah ini:

1. Berdasarkan buku dasar ADART FPI, dijelaskan bahwa FPI mengambil aswaja sebagai ideologinya. Dalam bidang aqidah mengikuti Imam al-Asy'ari dan dalam bidang fiqh mengikuti Imam Syafi'i.
2. Berdasarkan pengakuan para *Stake Holder* FPI, FPI itu berideologi aswaja tapi bentuk aswajanya tidak sama dengan aswaja yang selama ini dipahami oleh NU dan Muhammadiyah. Aswaja FPI lebih condong kepada konsep aswajanya Ustadz Jakfar Umar Thalib Yogyakarta.

Dengan demikian, terjadi kerancuan ideologi di dalam tubuh FPI itu sendiri. Namun, terlepas dari itu terdapat fakta yang menarik diulas, yaitu terkait dengan sikap radikal-fundamentalis FPI. Adalah dipengaruhi oleh ideologi yang mereka pahami dan anut.

Daftar Pustaka

- Alip Purnomo, *FPI Disalah Pahami*, cet. Ke-1, (Jakarta: Madiatama Indonesia, 2003).
- Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
- Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1968).
- Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI: Mengungkap Rahasia-rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008).
- Tim Penulis Batartama, *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah, dan tasawuf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2012).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI (Jakarta Pusat).
- Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja*,
- M. Afif Hasan, *Ideologi Transnasional: Sebuah Pengantar Mewaspada Aswaja Oplosan*, (Mojokerto: Insan Global).
- Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam (Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara)*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Bekerja sama dengan Nadi Pustaka Yogyakarta, 2012).
- Sunardji Dahri Tiam, *Muqaddimah Berislam Kaffah (Secara Berurutan, dan Menyeluruh Sesuai al-Qur'an dan al-Sunah)*, (Malang: Intimedia, 2015).
- Abid Rohmanu, *Reinterpretasi Jihad: Relasi Fiqh dan Akhlak*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012).
- Muh. Tasrif, *Konsep Pluralisme Dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Nurcholis Madjid atas Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Pluralisme*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016).